SKRIPSI

IMPLEMENTASI PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI DESA PULAU MADU KECAMATAN PASILAMBENA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Oleh :

ROBYNSON

105611116719

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI DESA PULAU MADU KECAMATAN PASILAMBENA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan di usulkan oleh :

ROBYNSON
105611116719

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Pulau Madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar

Nama Mahasiswa : Robynson

Nomor Induk Mahasiswa : 105611116719

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr.Abdul Mahsyar, M.SI	**Dr. Drs. H. Anwar Parawangi, M.Si**

Mengetahui

Dekan	Ketua Program Studi
Dr. Ilyani Malik, S.Sos, M.Si	**Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si**
NBM: 730727	**NBM : 1067463**

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universtias Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0174/fsp/A.4-II/VII/45/2023 Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Ilmu Administrasi Negara yang dilakanakan pada 15 Agusutus Tahun 2023.

TIM PENILAI

Ketua	Sekertaris
Dr. Ihvani Malik, S.Sos, M.Si	**Andi Luhur Prianto,S.IP,M.Si**
NBM: 730727	**NBM :992797**

PENGUJI

1. **Dr. Abdul Mahsyar ,M.Si** ( )
2. **Drs. Muh Yusuf,S.Sos., M.Si** ( )
3. **Dr.Nur Wahid, S.Sos.,Msi** ( )
4. **Ahmad Syarif,S,Sos., M.I.Kom** ( )

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Robynson
Nomor Induk Mahasiswa	: 105611116719
Program Studi	: Ilmu Administasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul "Implementasi Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Pulau Madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar" adalah sepenuhnya karya ilmiah sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain, tidak melakukan penciplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ilmiah ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini.

Makassar, 22 Agustus 2023

Yang Menyatakan

Robynson

ABSTRAK

Robynson.2023 Implementasi Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Pulau Madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar *(*dibimbing oleh Abdul Masyar dan Anwar Parawangi).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Impelementasi Peneyediaan Air Minum dan Senitasi Berbasis Masyarakatt (PAMSIMAS) diDesa Pulau Madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Selayar. Jenis Penelitian ini adala Penelitian kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai impelementasi Peneyediaan Air Minum dan Senitasi Berbasis Masyarakatt (PAMSIMAS) diDesa Pulau Madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Selayar. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara.observasi dan dokumentasi. Adapun informasn pada penelitian ini berjumlah 4 orang.

Hasil pada penelitian ini menunjukan 1) Implementasi Pamsimas Di Desa Pulau Madu Kecamatan Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Penelitian ini indicator Komunikasi dalam program PAMSIMAS menunjukan bahwa Program PAMSIMAS di Desa Pulau madu masih perlu di tingkatkan Kembali dikarenakan penyaluran air yang masih tidak merata di rasakan masyrakat. Pada Penelitian ini Indikator Sumber daya menunjukan bahwa tidak berjalan secara merata,serta Kondisi sarana sanitasi masyarakat Desa masih sangat minim di beberapa dusun untuk itu diperlukan peningkatan. Pada Indikator Disposisi Pelaksanaan Program menjukan bahwa manajemen pelaksanaan PAMSIMAS dilakukan dengan melalukan evaluasi disetiap bulannya baik itu dengan melalui laporan yang dibuat disetiap bulan dan juga dilakukan melalui rapat rutin.Pada Indikator Strukur Birokrasi Pelakanaan Program PAMSIMAS menunjukan bahwa Struktur birokrasi yang baik akan membuat pelaksana kebijakan memberikan ruang bagi para pelaksana melakukan berbagai koordinasi kepada semua unit terkait sehingga dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah. 2) Faktor-Faktor pendukung dan penghambat implementasi Pamsimnas di Di Desa Pulau Madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar. Faktor pnghambat sarana dan prasarna yang kurang memadai sedangkan factor pendukung yaitu partisipasi masyrakat

Kata Kunci : Implementasi, PAMSIMAS ,Pemerintah Desa

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yangtelah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Pulau Madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar".

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta saya, Ayahanda Musliadi dan Ibunda Siti Aminah atas segala kasih sayang, cinta, motivasi, serta doa yang tulus dan ikhlas yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah SWT sehingga menjadi semangat yang luar biasa bagi penulis dalam menggapai impian, serta keluarga yang selalu memberikan semangat, perhatian, saran, dan doa sehingga menjadi power bagi saya dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.
2. Ayahanda Dr.Abdul Mahsyar, M.SI selaku pembimbing I dan ayahanda Dr. Drs. H. Anwar Parawangi, M.Si selaku pembimbing II saya yang telah memberikan bimbingan dan segala arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ayahanda Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ayahanda Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Ibunda Nurbiah Tahir, S.Sos., M.Ap selaku Sekretaris Program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, serta seluruh staff di ruang lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Demikian kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Di akhir tulisan ini penulis memohon maaf

atas segala kekurangan dan kekhilafan, baik yang disadari maupun tidak disadari. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 15 Juli, 2023

Robynson

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**
HALAMAN PENERIMAAN TIM ..... **iii**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **9**
A. Penelitian Terdahulu 9
B. Kajian Teori 13
C. Kerangka Pikir 24
D. Fokus Penelitian 27
E. Deskripsi Fokus Penelitian 27
BAB III METODE PENELITIAN **28**
A. Waktu dan Tempat Penelitian 28
B. Tipe dan Jenis Penelitian 28
C. Sumber Data 29
D. Informan Penelitian 29
E. Teknik Pengumpulan Data 30
F. Keabsahan Data 32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN **33**
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 33
B. Hasil Penelitian 44
C. Pembahasan 58

BAB V PENUTUP **63**
A. Kesimpulan..... 63
B. Saran 64
DAFTAR PUSTAKA..... **65**
LAMPIRAN **68**
DAFAR RIWAYAT HIDUP **74**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Informan Penelitian 30

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Selayar 38

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Pasilambena 38

Tabel 4.3 Jumlah Desa penduduk Pulo Madu 42

Tabel 4.4 Jumlah pengguna PAMSIMAS 51

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 26

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Kepulauan Selayar 36

Gambar 4.2 Mesin Pompa Air Bersih 51

Gambar 4.3 Rapat Rutin Pengurus PAMSIMAS dan Masyarakat 54

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Pamsimas telah berjalan hampir 11 tahun dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.Implementasi program Pamsimas ini mengalami pasang surut dan mengalami beberapa permasalahan. Banyak diantara desa-desa yang menjadi desa Pamsimas dapat menjalankan program ini dengan baik, dan sesuai dengan indikator-indikator capaian yang diinginkan. K. Yasminel, M. Rahdriawan, (2020). "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" (UUD pasal 33 ayat 3) merupakan suatu pembuktian hukum atas hak dasar setiap WNI untuk memanfaatkan kekayaan Negara untuk kesejahteraan hidupnya. Praktisi, (2015).

Tantangan yang dihadapi Indonesia terkait dengan kesehatan khususnya masalah air dan sanitasi serta perilaku hidup sehat masih sangat besar. Bagus Danar Andito, Ari Subowo, (2013). Hal ini menyebabkan masalah di masyarakat sulitnya air bersih berdampak pada kehidupan sosial, Program Pamsimas adalah salah satu program Pemerintah Pusat dalam pembangunan yang masuk ke desa-desa untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berhubungan dengan air dan lingkungan yang berbasis masyarakat Firdaus, 2020. Pembangunan kesejahteraan.

Upaya pemenuhan kebutuhan air bersih yang selanjutnya dapat memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat sebenarnya merupakan salah satu amanat bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan didaerahnya, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah. Kedua kebijakan itu memberi amanat kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota bahwa penyelenggaraan penyediaan air minum merupakan urusan wajib bagi pemerintah kabupaten karena menyangkut pelayanan prasarana dasar. Artinya, masyarakat di setiap daerah (dalam memenuhi kebutuhannya terhadap air bersih membutuh-kan koordinasi yang memadai dari berbagai pihak yang terlibat didalamnya. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka pemerintah daerah berperan utama menjamin ketersediaan air bersih. Dengan demikian, dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, pihak penyelenggara penyedia air bersih, dan masyakat (Kornita, 2020).

Pembangunan sosial yang memberi perhatian pada keseimbangan kehidupan manusia dalam memperbaiki kondisi sosialnya Kristanto & Selly, (2021) Tujuan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) untuk meningkatkan akses air bersih kepada masyarakat baik di desa maupun kota, sehingga perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dapat diwujudkan Novianigsih & Mursyidah, (2019).

Pelaksanaan program PAMSIMAS dilandasi dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJPN mengamanatkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 layanan dasar air minum dan sanitasi dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia Helva Rahmi & Elsyra, (2022).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagai pelayanan publik yang mendasar menyebutkan bahwa pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib pemerintah daerah, dimana penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah. Untuk mendukung kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi SPM tersebut, program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (selanjutnya disebut PAMSIMAS) berperan dalam menyediakan dukungan finansial baik investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non fisik dalam bentuk manajemen dukungan teknis, dan pengembangan kapasitas.(Chyntia Apulina Karina Surbaktil, Edy Akhyary2, 2022).

Program Pamsimas adalah salah satu program andalan pemerintah dalam penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat pedesaan dan pinggiran kota melalui pendekatan berbasis masyarakat. Program Pamsimas dimulai pada tahun 2008, dimana dalam pelaksanaanya sampai dengan tahun 2012 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin pedesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi. Program Pamsimas II, Tahun 2013-2016 merupakan kelanjutan program Pamsimas 2008-2012 sebagai instrumen pelaksanaan dua agenda nasional untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan,yaitu (1) Air Bersih untuk Rakyat, dan (2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Program Pamsimas ini merupakan salah satu tujuan dari Millennium Development Goals (MDGs) yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan

masyarakat. Salah satunya dalam pembangunan air minum dan sanitasi (water supply andsanitation).Sebagai pelayanan publik yang mendasar, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Untuk mendukung kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), program Pamsimas ini berperan dalam menyediakan dukungan finansial baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik dalam bentuk manajemen, dukungan teknis, dan pengembangan kapasitas. Berdasaran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 tahun 2014 bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat serta penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai universal access pada akhir tahun 2019.

Implementasi Pamsimas di Kepulauan Selayar saat ini telah berjalan, adanya program pamsimas dapat berdampak baik terhadap masyarakat kepulauan khusunya di Desa Pulau Madu, namun ada beberapa masalah terkait dengan keberadan pamsimas di Kepulauan Selayar, banyak masyarakat mengeluhkan masalah kelancaran terkait air bersih di Desa Pulau Madu salah satunya masih banyak warga yang kesulitan untuk mendapatkan air minum atau air bersih yang layak, hal ini di karenakan pamsimas yang tidak berfungsi dengan baik tidak sesuai dengan harapan masyarakat dimana yang mereka harapkan dengan adanya

pamsimas masyarakat tidak kesulitan lagi dalam memperoleh air bersih untuk keperluan sehari hari mereka, akan tetapi belum ada solusi yang bisa memenuhi kebutuhan air bersih untuk keseluruhan masyarakat di Pulau Madu.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian dari pembangunan sosial yang memberi perhatian pada keseimbangan kehidupan manusia dalam memperbaiki kondisi sosialnya. Kristanto & Selly, (2021). Pembangunan pamsimnas yang baik dapat merubah gaya kehidupan masyarakat Desa Pulau Madu, adanya pembangunan yang baik berdampak dengan kesejahtrean masyarakat. Pamsimas dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat, melalui pelibatan masyarakat (perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin) serta pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Kedua pendekatan tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan prakarsa, inisiatif dan partisipatif aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat di masyarakat termasuk di lingkungan sekolah.

Program pembangunan sarana air minum dan sanitasi per-Kelurahan di Indonesia sudah dilaksanakan seejak 1969. Keberhasilan yang dicapai dapatdilihat melalui terjadinya peningkatan dalam cakupan pelayanan, kemampuan institusi pengelola sarana, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Program penyediaan sarana dan prasarana masyarakat seperti air minum, sanitasi dan kesehatan lingkungan akan efektif dan berkelanjutan apabila berbasis pada masyarakat (*community base*), melibatkan seluruh masyarakat (perempuan-laki,

kaya- miskin), dan menggunakan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarkat. Chenda Destarian1, (2015).

Dari hasil observasi awal implementasi pada penyaluran pamsimas memiliki beberapa kendala sehingga banyak masyarakat mengeluh dan tidak puas dengan pamsimas di Desa pulau madu kecamatan pasilambena, kepulauan selayar oleh karena itu penulis membuat judul penelitian yang berjudul, Implementasi Penyediaan Air Minum Dan Senetasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Desa Pulau Madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kurang lebih ada 500 kepala keluarga yang ada di Desa Pulau Madu Kecamatan Pasilambena, namun yang dapat mengakses air bersih dari program pamsimas baru sekitar 20%. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar nomor 6 tahun 2008 mengenai Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih perusahaan daerah air minum kabupaten selayar, yaitu : Bahwa perusahaan daerah air minum sebagai perusahaan daerah selain selain memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah,sehingga perlu dikelola secara provesional.

Pelaksanaan program ini ditanggungjawabi oleh masyarakat langsung dan didukung oleh unit pengolah program di tingkat pusat dan daerah, serta konsultan dan fasilitator. Untuk pengajuan program ini dapat dilihat dari proses pengajuan yang dilakukan desa-desa di Kabupaten Selayar . Tepatnya dari Pemerintah Pusat setiap Bupati diberi kesempatan untuk mengusulkan desa-desa

yang memeliki urgensi untuk pelaksanaan PAMSIMAS. Kemudian setelah jumlah desa ditetapkan, langkah berikutnya dilakukan oleh Tim Panitia Kemetraan bersama dengan Tim Fasilitator PAMSIMAS Kabupaten untuk melakukan penjaringan yang disertai sosialisasi pemahaman kepada warga desa dan setelah itu pengajuan proposal kepada Tim diatasnya yang menerima total proposal masuk yang akan diproses oleh mereka dan diberikan datanya kepada Bupati.

Setelah semua proses berlalu, IMAS (Identifikasi Masyarakat) adalah tahap selanjutnya untuk penajaman kesiapan lokasi desa pengusul terkait sarana prasarana, sumber daya, kesiapan pendanaan dan dukungan Masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan melihat luasnya cakupan masalah diatas maka muncul pertanyaan.

1. Bagaimana Implementasi Pamsimas Di Desa Pulau Madu Kecamatan Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar?
2. Faktor-Faktor pendukung dan penghambat implementasi Pamsimnas di Di Desa Pulau Madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Implementasi Pamsimnas di Desa Pulau Madu Kecamatan Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Pamsimas di Desa Pulau Madu Kecamatan Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan berkontribusi antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa pengetahuan terhadap Implementasi Pamsimnas di Desa Pulau Madu Kecamatan Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan implementasi Pamsimas di Desa Pulau Madu.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya maka penulis mengambil beberapa contoh penelitian yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Sehingga penulis dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari penelitian terdahulu kemudian membandingkan dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait yaitu:

1. Hasil penelitian Riska Firdaus (2020) yang berjudul "Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara". Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah dimana mulai dari tidak berjalannya program PAMSIMAS di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara padahal sudah ada bangunan disediakan, serta adanya kerusakan maupun ketidaklengkapan peralatan dalam bangunan Pamsimas tersebut, sehingga pelaksanaan program tersebut terkendala dan kurangnya keterlibatan langsung dari masyarakat di Desa Beringin Jaya serta kurangnya koordinasi pihak pengelola Pamsimas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Teknik

pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan juga berdasarkan data dari program Pamsimas di Desa Beringin Jaya. Hasil penelitian yang dilakukan dengan beberapa indikator yang dikemukakan oleh Grindle (1980) yaitu kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, (siapa) pelaksana program, dan sumber daya yang dihasilkan, menunjukkan bahwa Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara belum berjalan dengan baik dan dalam proses pelaksanaanya masih belum maksimal karena masyarakat masih mengeluhkan sistem program Pamsimas ini (Firdaus, 2020).

2. Hasil penelitian dari Safira Insani, Fis Uny (2021) dengan judul "Efektifitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyrakat (PAMSIMAS) Di Temanggung". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program Pamsimas di Kabupaten Temanggung dan faktor-faktor yang menghambat efektivitas program Pamsimas di Kabupaten Temanggung. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Informan penelitian Staff Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Kabupaten Temanggung, Ketua Panitia Kemitraan Program Pamsimas, Wakil Ketua Panitia Kemitraan Program Pamsimas, DPMU Program Pamsimas, Ketua Asosiasi BPSPAMS, Sekretaris Asosiasi BPSPAMS, Fasilitator Desa Pamsimas, dan masyarakat kelompok sasaran program. Instrumen penelitian adalah peneliti dengan menggunakan alat bantu pedoman wawancara. Teknik

pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Analisis data penelitian menggunakan empat tahap yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas Program Pamsimas di Kabupaten Temanggung dinilai dari indikator/ ukuran: 1) Produktivitas, sarana air dan sanitasi yang telah dibangun berfungsi serta pelatihan yang dilakukan mampu meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat. 2) Efisiensi, tujuan dari program sudah tercapai dan sumber-sumber yang ada seperti SDA, SDM, dan dana bantuan digunakan dengan efektif sehingga menghasilkan keluaran yang efisien. 3) Kepuasan, berhasilnya program yang dilakukan, memberikan kepuasan terhadap masyarakat dan sarana yang dibangun memberikan hasil yang efektif. 4) Kemampuan Adaptasi, program yang dilakukan telah mampu mengubah perilaku masyarakat hal ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program sudah efektif. 5) Perkembangan, Program Pamsimas Kabupaten Temanggung berhasil dan berkembang dengan efektif sehingga memperoleh dana HIK dan HID sebagai dana pengembangan dan penghargaan kepada desa dan kabupaten berprestasi (Berbasis & Pamsimas,n.d.).

3. Hasil penelitian dari Ida Yati, Endang Wirjatmi Trilestari, Ely Sufianti, Sutarto Mochtar, Hendrikus Tri Gedeona, Darti Sugiharti (2021) dengan judul "Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Penyediaan Air Minum Dan

Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Kabupaten Purwakarta (Studi Kasus Di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu)". Program Pamsimas merupakan salah satu program Pemerintah untuk meningkatkan akses jumlah warga miskin perdesaan yang dapat terlayani perbaikan pelayanan fasilitas air minum dan sanitasi serta untuk meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi kajian evaluasi Pamsimas dengan tujuan utama mengevaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Pamsimas tahun 2018-2019 di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta. Evaluasi pelaksanaan kebijakan program Pamsimas dianalisis dengan menggunakan enam aspek evaluasi program yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Validasi data diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program Pamsimas tahun 2018-2019 di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu belum memberikan pengelolaan program Pamsimas dengan optimal sehingga belum bermanfaat secara menyeluruh untuk masyarakat Desa Cikadu Kecamatan Cibatu. Program Pamsimas baru mencapai sebanyak 45 KK dengan jumlah penduduk 132 jiwa dari data awal berdasarkan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah disepakati adalah 322 KK, maka pencapaian kinerja pada penyediaan air minum/bersih sangat rendah yaitu baru mencapai 14 %. Hambatan yang paling utama mempengaruhi dalam keberhasilan pelaksanaan program

Pamsimas Di Desa Cikadu yaitu kurang terjalinnya koordinasi dengan baik antar anggota Pokja AMPL Kabupaten Purwakarta. Kegiatan kolaborasi, peran program Pamsimas sangat penting untuk mendorong SKPD terkait melakukan percepatan pengembangan akses air minum dan sanitasi perdesaan (Dan et al., 2021).

Dalam penelitian terdahulu dan sekarang terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS). Sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan dan lokasi penelitian.

B. Kajian Teori

Dalam memberikan suatu arah pada studi ini di perlukan adanya teori-teori yang mendukung kea arah permasalahan, karena teori merupakan sarana atau alat yang digunakan sebagai rangka berfikir untuk mengetahui variable yang di teliti dan cara pemecahanya secara teoritis.

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari Bahasa inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undangundang, peraturan pemerintah, keputusan

peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Browne dan Wildavsky (usman, 2005:7) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan. Sedangkan menurut Syaukani (2006:295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijkasanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2008) mendefenisikan implementasi kebijakan ialah suatu tindakan yang akan dilakukan baik oleh individu maupun dalam kelompok dan pejabat-pejabat pemerintah dan swasta yang ditujukan demi tercapainya tujuan- tujuan yang telah ditentukan oleh sebuah keputusan kebijaksanaan, mereka menekankan bahwa tahapan implementasi baru terjadi selama proses legitimasi dilalui dan pengalokasian sumber daya, dana yang telah disepakati tidak pada saat dimulai pada saat tujuan dan sasaran kebijakan publik ditetapkan, tetapi tahap implementasi (Rahmawati et al., 2020).

Implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh George C. Edwards III dalam Leo (2006:79) ini dikenal dengan " *Direct and Indirect Impact on Implementation"*. Teori tersebut dituangkan dalam karya tulisnya yang berjudul "*Implementing Public Policy*".

Model Implementasi Soren C. Winter Implentasi kebijakan dipengaruhi oleh formulasi kebijakan, proses implementasi kebijakan, dan dampak/hasil implementasi kebijakan itu sendiri. 3 (tiga) variabel yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi yakni

1) Perilaku hubungan antar organisasi. Dimensinya adalah : komitmen dan koordinasi antar organisasi;
2) Perilaku implementor (aparatbirokrat) tingkat bawah. Dimensinya adalah kontrol politik, kontrol organisasi dan etos kerja dan norma-norma profesional
3) Perilaku kelompok sasaran. Kelompok sasaran tidak hanya memberi pengaruh pada dampak kebijakan tetapi juga mempengaruhi kinerja aparat tingkat bawah, jika dampak yang ditimbulkan baik maka kinerja aparat tingkat bawah juga baik demikian dengan sebaliknya. Perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif atau negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan yang disertai adanya umpan balik berupa tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dibuat.

Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn Model ini bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

1) Standar dan sasaran kebijakan Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi.
2) Sumber daya Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.
4) Karateristik agen pelaksana Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karateristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
6) Disposisi implementor Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu :
    a. Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;
    b. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan;

c. Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Model George C. Edward III implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1) Komunikasi Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2) Sumberdaya Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial.Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
3) Disposisi Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat

kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4) Struktur Birokrasi Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan 18 dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses pembuatan kebijakan (policy making process). Seperti dinyatakan Hasbullah (2015), bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan proses politik yang berlangsung dalam tahap-tahap pembuatan kebijakan politik, dimana aktivitas politis ini dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan divisualisasikansebagai serangkaian tahap yang saling bergantung satu sama lainnya, diatur menurut urutan waktu, seperti penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan (Emmett Grames, 2020).

Implementasi kebijakan menurut Dwijowijoto, 2004 “Implementasi kebijakan adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakksanaan dapat

mencapai tujuannya". Sementara Putt dan Spinger dalam Syafruddin, 2008 "Implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan dalam formulasi terwujudnya ke dalam praktik organisasi". Sementara pengertian implementasi kebijakan menurut Wahab, 2007 adalah "Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan dasar, biasanya bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara menstrukturkan proses implementasinya (Wahyudi, 2020).

Menurut (Nugroho, 2004) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai sebuah cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. Kedua pendapat tersebut mempunyai kesimpulan yang sama, yaitu implementasi kebijakan merupakan sebuah cara untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari sebuah kebijakan. Pengertian dari Winarno menjelaskan implementasi lebih rinci dengan menjabarkan pihakpihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, seperti organisasi, aktor-aktor (pemerintah dan non pemerintah) dan sistem yang ada di dalam implementasi kebijakan itu sendiri (Suprapto & Malik, 2019).

Menurut Grindle (Waluyo, 2007:49) menyatakan bahwa, implementasi kebijakan publik sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia

menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa suatu kebijakan (Iman et al., 2023).

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu.

PAMSIMAS yaitu program yang di laksanakan pemerintah untuk membantu menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam penyediaan air bersih serta mengatasi masalah sanitasi yang berbasis masyarakat terutama masyarakat perdesaan dan pinggiran kota (Filsa Nurtifani Sulaiman, Khotibul Umam, 2022). Pamsimas sangat penting bagi masyrakat perdesaan adanya implementasi pamsimas dapat mempermuda masyarakat dalam memperoleh air bersih di perdesaan. Air bersih dan sanitasi yang baik merupakan elemen yang sangat penting untuk menunjang kesehatan manusia. Sayangnya pemenuhan akan kebutuhan air bersih dan sanitasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik di beberapa belahan dunia. Sebenarnya terdapat cukup air bersih di planet ini untuk memenuhi kebutuhan mendasar tersebut (Ia, 2015).

Menurut (Mara dan Alabaster, 2008) yang di kutip dalam (Litbang et al, 2014) Penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi untuk masyarakat

miskin baik di perkotaan dan pedesaan harus memperhatikan bentuk layanan yang sesuai. Paradigma baru penyediaan air minum dan sanitasi menegaskan pelayanan air minum dalam bentuk komunal bukan individual rumah tangga. Hal ini didasarkan pada penghematan atau efisiensi biaya baik dalam pembangunan maupun operasional infrastruktur air minum dan sanitasi. Dengan demikian bentuk pelayanan infrastruktur air minum harus di perhatikan karena sangat menentukan kualitas pemanfaatan dan keberlanjutan infrastruktur air minum dan sanitasi.

2. Implementasi Kebijakan Pamsimas

Kebijakan pembangunan pada hakikatnya haruslah bersifat adil, demokrasi, terbuka, partisipatif, dan terintegrasi, sehingga kesenjangan pembangunan daerah yang ada saat ini dapat teratasi. Untuk mengatasi suatu ketertinggalan di daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah itu sendiri. Dalam sebuah pembangunan diperlukan suatu pembangunan yang menyeluruh, mulai dari pembangunan sektor kecil pembangunan tingkat desa dengan berbagai faktor permasalahan di desa yang dilanjut ke tingkat permasalahan yang lebih tinggi ke tingkat Kabupaten/Kota dan Nasional.

Air minum dan sanitasi merupakan sektor infrastruktur yang penting dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat, terutama dalam menurunkan angka penyakit yang ditularkan melalui air dan lingkungan. Berdasarkan UU No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab penuh untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu pelayanan air minum dan sanitasi. Selain itu, Peraturan

Menteri Kesehatan No.3/2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat juga mengamanatkan pentingnya kesehatan sanitasi dalam rangka mencapai Indonesia sehat. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat merupakan salah satu program Pemerintah dalam rangka menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat melalui penyediaan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pengembangan et al, 2018).

Program Pamsimas merupakan program berbasis masyarakat, yang mana dalam pelaksanaannya masyarakat terlibat secara langung dalam setiap tahapnya. Dalam tahap perencanaan yaitu berupa, pembuatan perencanaan dengan menyusun RKM (Rencana Kerja Masyarakat).Selanjutnya dalam tahap pelaksanaan,rencana yang telah disusun di implementasikan mulai dari pembangunan fisik sarana air minum dan sanitasi,serta pelatihan atau penyuluhan untuk merubah perilaku masyarakat.Sarana air minum yang dibangun mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Program Pamsimas adalah salah satu program andalan Pemerintah di dalam penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat perdesaan melalui pendekatan berbasis masyarakat. Program Pamsimas mulai dilaksanakan pada tahun 2008 hingga akhir tahun 2015, tersebar di sekitar 12.000 desa di 233 Kabupaten/Kota di 32 provinsi di Indonesia,kecuali DKI Jakarta. Sebagai program stimulan dengan pendekatan berbasis masyarakat,program Pamsimas menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan sekaligus sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Program Pamsimas kembali akan dilaksanakan pada tahun 2016-2019 yang merupakan kelanjutan Program Pamsimas 2008-2015, sebagai

instrumen pelaksanaan dua agenda nasional untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu (1) 100%-100% akses air minum dan sanitasi, dan (2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Program PAMSIMAS bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas pada warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan. Dengan PAMSIMAS, diharapkan masyarakat dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. (Suriyani, 2020) Perlunya implementasi yang baik dari pemerintah untuk masyarakat agar program pamsimas dapat berjalan dengan baik dan lancar, pelayanan public yang baik dapat menciptakan masyarakat sejahtera.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

Secara umum sasaran program Pamsimas adalah :

1) Terdapat tambahan 22,1 juta penduduk yang dapat mengakses sarana air minum aman dan berkelanjutan.

2) Terdapat tambahan14,9 juta penduduk yang dapat mengakses sarana sanitasi yang layak dan berkelanjutan.
3) Minimal 60% masyarakat dusun (lokasi program) menerapkan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
4) Minimal 70% pemerintah kabupaten memiliki dokumen perencanaan daerah bidang air minum dan sanitasi untuk mendukung adopsi dan pengarusutamaan pendekatan Pamsimas dan pencapaian target pembangunan air minum dan sanitasi daerah.
5) Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dari APBD untuk pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi yang telah dibangun serta perluasan program air minum dan sanitasi untuk mencapai target Universal Access 2019. Sasaran program Pamsimas ini adalah kelompok miskin di pedesaan dan pinggiran kota (peri-uban) yang memiliki prevalensi penyakit terkait air yang tinggi dan belum mendapatkan akses layanan air minum dan sanitasi. Sasaran penerima manfaat program Pamsimas II adalah warga desa/kelurahan yang belum mempunyai akses terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak terutamakelompok miskin, dan masyarakat terpinggirkan atau disebut juga masyarakat adat dan komunitas adat terpencil (MAKAT) yang diidentifikasi oleh masyarakat sendiri, disepakati dan ditetapkan bersama oleh masyarakat desa/kelurahan melalui proses musyawarah warga.

C. Kerangka Pikir

Pada pelaksanaan implementasi penyedian air bersih perlu adanya peran aktif Pemerintah kepada masyarakat agar pemerintah mengetahui secara langsung permasalahan yang ada di masyarakat terkait air bersih Berdasarkan rumusan

masalah yang telah dikemukakan maka peneliti memberikan gambaran sesuai judul dan teori yang telah dibahas untuk menentukan bagaimana Implementasi Penyediaan Air Minum Dan Senetasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Desa Pulau Madu Kecamatan Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar.Penelitian ini menggunakan teori Implementasi kebijakan Edward III Dengan 4 indikator yaitu Komunikasi ,Sumber daya, Disposisi dan struktur birokrasi Dengan demikian,pada penelitian ini alur pikir penelitian dapat dilihat pada gambar kerangka pikir sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir
Gambar 2.1

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pikir diatas, maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Pulau Madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar dengan menggunakan indikator Implementasi.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah di uraikan, penulis akan mendeskripsikan indikator dari Implementasi dalam memberikan implementasi yang sesuai.

1. Kumunikasi yaitu komunikasi antara masyarakat dan juga pelaksana program PAMSIMAS
2. Sumber daya yaitu sumber daya yang memadai dalam implemntasi kebijakan PAMSIMAS
3. Disposisi yaitu sikap dari pelaksana kebijakan untuk dapat mengetahui keberhasilan dari implementasi PAMSIMAS.
4. Struktur Birokrasi yaitu Kemajuan alih Kelola fungsi-fungsi serta tanggung jawab program kepada pemerintah local

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian

   Penelitian ini di laksanakan mulai pada tanggal 25 mei 2023 s/d 25 juli 2023

2. Lokasi penelitian

   Penelitian akan dilaksanakan di Desa Pulau Madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar.

B. Tipe dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Berkaitan dengan judul penelitian adalah untuk memberikan gambaran mengenai implementasi penyedian air bersih dan sanitasi untuk masyarakat Desa Pulo Madu, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

2. Tipe Penelitian

   Tipe penilitian ini adalah deskripif yang dimaksud untuk memberikan gambaran lengkap dan klarifikasi secara jelas mengenai suatu masalah yang akan di teliti berdasarkan apa yang dilakukan atau dialami peneliti.Masalah yang akan diteliti terkait dengan implementasi penyedian air bersih dan sanitasi untuk masyarakat Desa pulau madu, kecamatan pasilambena, kabupaten kepulauan selayar. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia,

penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, pendapat, ataupun kepercayaan orang yang di teliti dan semuanya tidak dapat diukur dengan angka.

C. Sumber Data

Menurut S.P Siagian dalam Harahap, (2020) sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dari penelitian :

1. Data Primer

   Data primer ini di peroleh dari lapangan atau lokasi penelitian berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan dan observasi secara langsung sesuai objek penelitian tentang Implementasi Penyediaan Air Minum Dan Senetasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Desa Pulau Madu Kecamatan Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui tulisan berupa laporan, peraturan dan dokumen yang berkaitan dengan Implementasi Penyediaan Air Minum Dan Senetasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Desa Pulau Madu Kecamatan Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan memberikan informasi kepada peneliti atau yang akan menjadi informan yaitu orang-orang yang dapat melengkapi informasi tentang bagaimana Implementasi Penyediaan Air Minum Dan Senetasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Pulau Madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan berikut Informan pada Penelitian ini:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	NAMA	JABATAN
1	Muhidin	Sekretaris Desa Pulo Madu
2	Isnawir	Pegawai Pamsimas
3	Jaenudin	Masyarakat
4	Sadam	Masyarakat

Sumber: Instansi Pemerintahan Desa Pulau Madu

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono dalam Harahap, (2020) adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap masalah yang tampak pada objek penelitian, teknik ini juga digunakan untuk mengetahui relevansi antara keterangan informan dan data yang ada dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu untuk mendapatkan gambaran mengenai objek peneliti dengan cara tanya-jawab secara lebih mendalam dan bertatap muka langsung dengan informan, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan.

3. Dokumen/Arsip

Dokumen yang dimaksud adalah yang dapat memperoleh data-data

pendukung (data sekunder) dari beberapa literature baik berupa artikel, buku, Hasil penelitian yang relevan, dokumen-dokumen tertulis lain sebagai referensi yang berkaitan dengan objek penelitian.

Menurut Sugiyono, (2015) teknik analisis data adalah langkah yang dilakukan untuk mengelolah data, dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa dan menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini adalah peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok pada hal-hal yang penting dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi oleh peneliti, maka selanjutnya peneliti menyajikan data kedalam bentuk yang lebih sederhana seperti uraian ringkas, table informan, dan gambar kerangka fikir. Dengan demikian penyajian data akan sangat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami oleh peneliti.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti akan memperoleh kesimpulan yang tentative, kaku dan meragukan sehingga kesimpulan tersebut perlu di verifikasi, kesimpulan yang ditulis oleh peneliti senantiasa di verifikasi selama penelitian berlangsung agar

kesimpulan yang di hasilkan tidak diragukan dan dapat dipercaya.

F. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono, (2015) salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan data triangulasi, teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dansumber data yang yang telah ada. Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga macam triangulasi diantaranya yaitu:

1. Triangulasi Tehnik

Yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

2. Triangulasi Waktu

Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas dapat dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu yang berbeda.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten Kepulauan Selayar adalah Kota Benteng. Kabupaten ini memiliki luas sebesar 10.503,69 km² (wilayah daratan dan lautan) dan berpenduduk sebanyak ±134.000 jiwa. Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 2 sub area wilayah pemerintahan yaitu wilayah daratan yang meliputi kecamatan Benteng, Bontoharu, Bontomanai, Buki, Bontomatene, dan Bontosikuyu serta wilayah kepulauan yang meliputi kecamatan Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Takabonerate, Pasimarannu, dan Pasilambena. Pada masa lalu, Kabupaten Kepulauan Selayar pernah menjadi rute dagang menuju pusat rempah-rempah di Maluku. Di Pulau Selayar, para pedagang singgah untuk mengisi perbekalan sambil menunggu 38 musim yang baik untuk berlayar. aktivitas pelayaran ini pula muncul nama Selayar. Nama Selayar berasal dari kata cedaya (Bahasa Sanskerta) yang berarti satu layar, karena konon banyak perahu satu layar yang singgah di pulau ini. Kata cedaya telah diabadikan namanya dalam Kitab Negarakertagama karangan Empu Prapanca pada abad 14. Ditulis bahwa pada pertengahan abad 14, ketika Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk yang bergelar Rajasanegara, Selayar digolongkan dalam Nusantara, yaitu pulau-pulau lain di luar Jawa yang berada di bawah kekuasaan Majapahit. Ini berarti bahwa armada Gajah Mada atau

Laksamana Nala pernah singgah di pulau ini. Selain nama Selayar, pulau ini dinamakan pula dengan nama Tana Doang yang berarti tanah tempat berdoa. Di masa lalu, Pulau Selayar menjadi tempat berdoa bagi para pelaut yang hendak melanjutkan perjalanan baik ke barat maupun ke timur untuk keselamatan pelayaran mereka.

Dalam kitab hukum pelayaran dan perdagangan Amanna Gappa (abad 17), Selayar disebut sebagai salah satu daerah tujuan niaga karena letaknya yang strategis sebagai tempat transit baik untuk pelayaran menuju ke timur dan ke barat. Disebutkan dalam naskah itu bahwa bagi orang yang berlayar dari Makassar ke Selayar, Malaka, dan Johor, sewanya 6 rial dari tiap seratus orang. Belanda mulai memerintah Selayar pada tahun 1739. Selayar ditetapkan sebagai sebuah keresidenan dimana residen pertamanya adalah W. Coutsier (menjabat dari 1739-1743). Berturut-turut kemudian Selayar diperintah oleh orang Belanda sebanyak 87 residen atau yang setara dengan residen seperti Asisten Resident, Gesagherbber, WD Resident, atau Controleur. Barulah Kepala pemerintahan ke 88 dijabat oleh orang Selayar, yakni Moehammad Oepoe Patta Boendoe. Saat itu telah masuk penjajahan Jepang sehingga jabatan residen telah berganti menjadi Guntjo Sodai, pada tahun 1942. Di zaman Kolonial Belanda, jabatan pemerintahan di bawah keresidenan adalah Reganschappen.

Reganschappen saat itu adalah wilayah setingkat kecamatan yang dikepalai oleh pribumi bergelar "Opu". Dan kalau memang demikian, maka setidak-tidaknya ada sepuluh Reganschappen di Selayar kala itu, antara lain: Reganschappen Gantarang, Reganschappen Tanete, Reganschappen Buki,

Reganschappen Laiyolo, Reganschappen Barang- Barang dan Reganschappen Bontobangun. Di bawah Regaschappen ada kepala pemerintahan dengan gelar Opu Lolo, Balegau dan Gallarang. Pada tanggal 29 November1945 (19 Hari setelah Insiden Hotel Yamato di Surabaya) pukul 06.45 sekumpulan pemuda dari beberapa kelompok dengan jumlah sekitar 200 orang yang dipimpin oleh seorang pemuda bekas Heiho bernama Rauf Rahman memasuki kantor polisi kolonial (sekarang kantor PD. Berdikari). 40 Para pemuda ini mengambil alih kekuasaan dari tangan Belanda yang di kemudian hari tanggal ini dijadikan tanggal Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tahun Hari Jadi diambil dari tahun masuknya Agama Islam di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibawa oleh Datuk Ribandang, yang ditandai dengan masuk Islamnya Raja Gantarang, Pangali Patta Radja, yang kemudian bernama Sultan Alauddin, pemberian Datuk Ribandang. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1605, sehingga ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 29 November 1605. Kabupaten Selayar yang merupakan salah satu Kabupaten dalam wilayah Provinsi Slawesi Selatan, terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) yang kemudian berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan PP. No. 59 Tahun 2008. Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan satu-satunya Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang secara geografis terpisah dari daratan Pulau Sulawesi. Selayar yang dikenal dengan sebutan “Tanah Doang” yang berarti

“Tanah Tempat Berdoa” adalah wilayah kepulauan dengan jumlah 130 pulau, baik berukuran besar maupun kecil yang terhampar mengarah ke utara sampai selatan. Diantara hamparan pulau-pulau 41 tersebut, terdapat gugusan karang atol Taka Bonerate yang merupakan atol terbesar ke-3 di dunia.

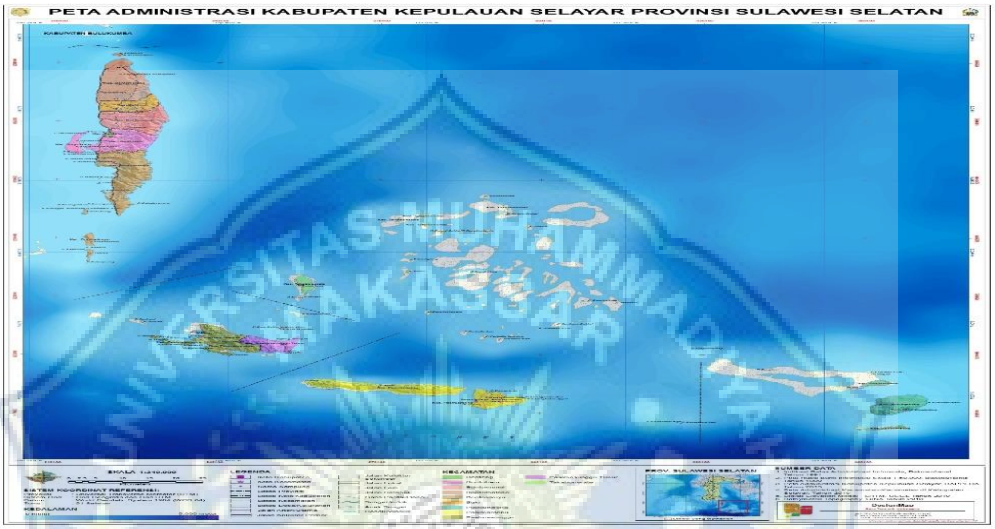

Gambar 4.1. Peta Kabupaten Kepulauan Selayar

a. Letak Geografis

Kabupaten Kepulauan Selayar (dahulu Kabupaten Selayar, perubahan nama berdasarkan PP. No. 59 Tahun 2008) adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Kota Benteng. Kabupaten ini memiliki luas sebesar 10.503,68 km² (wilayah daratan dan lautan) dan dengan jumlah penduduk sebesar 123.283 jiwa. Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 2 sub area wilayah pemerintahan yaitu wilayah daratan yang meliputi Kecamatan Benteng, Bontoharu, Bontomanai, Buki, Bontomatene, dan Bontosikuyu. Serta wilayah kepulauan yang meliputi Kecamatan

Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Takabonerate, Pasimarannu, dan Pasilambena.

Batas wilayah Kabupaten Selauar Sebelah Utara : Kabupaten Bulukumba . Sebelah Selatan : Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 3. Sebelah Timur : Laut Flores 4. Sebelah Barat : Laut Flores dan selat Makassar.

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan memanjang dari utara ke selatan yang terdiri dari gugusan pulau-pulau. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503,69 Km² yang terdiri 1,357,03 Km² daratan dan 9.146,66 Km² wilayah pengelolaan laut.

Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar No Kecamatan Luas (km2)

Pasimarannu 176,35, Pasilambena 102,99, Pasimasunggu 114,5, Taka Bonerate 221,07, Pasimasunggu Timur 47,93, Bontosikuyu 199,11, Bontoharu 129,75, Benteng 7,12, Bontomanai 115,56, Bontomatene 159,92, Buki 82,73. Sumber: Kepulauan Selayar Dalam Angka BPS, 2011.

b. Letak Demografis

Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar tercatat sebanyak 103.473 jiwa. Dalam 3 tahun kemudian (tahun 2021) jumlah penduduk tersebut telah mengalami pertambahan sebanyak 6.506 jiwa. Dengan dasar tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata pertambahan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar masih sebesar 1,95% setiap

tahunnya. Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2015 berjumlah sebanyak 121.749 jiwa terdiri dari 57.685 jiwa laki-laki dan 64.064 jiwa perempuan.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Selayar

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Benteng	18.860 Jiwa
2	Bontobaru	11.801 Jiwa
3	Bontomanai	13.62 Jiwa
4	Bontomantene	13.818 Jiwa
5	Bontosiyuku	14.450 Jiwa
6	Buki	6.778 Jiwa
7	Pasilambena	7.802 Jiwa
8	Pasimarannu	8.923 Jiwa
9	Pasimasunggu	7.008 jiwa
10	Pasimasunggu Timur	6.524 jiwa
11	Takabonerate	12.143 jiwa

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Pasilambena

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk
1	Garaupa	1065
2	Karumpa	1327
3	Garupa Raya	971
4	Pulo Madu	1726
5	Kalautoa	1835
6	Lemoang Matene	1172
7	Total	8096

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2021

c. Kondisi Sosial dan Budaya

Ketenagakerjaan Penduduk usia kerja dapat didefinisikan sebagai penduduk usia 15 tahun keatas, penduduk tersebut terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Agama Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar pada dasarnya merupakan masyarakat yang religius, beradat dan berbudaya,. Kabupaten Kepulauan Selayar adalah daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama islam dan kebanyakan berasal dari etnis Makassar yang masih mempertahankan tradisi, adat, dan keakraban. sejalan dengan hal tersebut maka tempat peribadatan bagi penganut agama islam terlihat jauh lebih banyak dari agama lain, sampai dengan akhir tahun 2012 jumlah Masjid sebanyak 173 Unit, Mushollah 24 unit sehingga jumlah tempat ibadah untuk umat muslim sebanyak 197 unit. Sementara tempat ibadah umat nasrani masing-masing tercatat 68 unit gereja protestan, 5 unit gereja katolik, umat budha 2 Unit dan hindu 1unit.

d. Sarana dan Prasarana Umum

Tingkat pendidikan di kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahunnya mengalami terselenggaranya layanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk sumberdaya manusia yang cerdas, profesional dan religius. "Peningkatan layanan pendidikan di semua 44 jenjang pendidikan adalah program utama sebagai jaminan terlaksananya proses pemerataan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar mengutamakan pembangunan pendidikan sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan sumber daya manusia. Hal ini dicerminkan oleh berbagai

upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengutamakan sektor pendidikan. Peningkatan layanan Pendidikan di semua jenjang pendidikan, Peningkatan Kualitas guru, peningkatan sarana dan prasarana layanan pendidikan, peningkatan kompetensi kelulusan. peningkatan kualitas layanan pendidikan nonformal dan informal, serta pembinaan pemuda dan olahraga.

Kabupaten Kepulauan Selayar dapat di akses melalui jalur udara dan darat. Terdapat dua maskapai penerbangan Nasional yang melayani rute ke selayar dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Jalur darat dengan menumpang bus dari terminal malengkeri menuju Tanjung Bira, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya melanjutkan perjalanan laut dengan feri penyeberangan menuju pelabuhan Pamatata dan perjalanan darat menuju Kota Benteng. Aneka alat transportasi di kota Bentengdapat dijumpai. Seperti Mobil, becak, dan perahu. Mobil digunakan sebagai angkutan dalam kota dan antar kecamatan. Becak menjadi kendaraan 45 yang mudah di jumpai di setiap sudut kota. Kapal laut menjadi penghubung antar pulau.

e. Jalur Darat

1) Naik Bus dari terminal Malengkeri (Kapasitas 40 kursi)
2) Bus berangkat jam 08.00 Wita setiap hari
3) Dari terminal malengkeri menuju pelabuhan tanjung bira, Kabupaten Bulukumba. Waktu tempuh 5-6 jam
4) Dari pelabuhan tanjung bira melnjutakn perjalanan laut dengan naik

feri penyebrangan menuju dermaga pamatata selayar.(terletak dibagian timur Pulau Selayar). Waktu tempuh 2 jam

5) Dari dermaga pamatata melanjutkan naik bus menuju terminal kota Benteng Selayar. (Terletak di Bagian Barat Pulau Selayar)

6) Tarif untuk bus Ac dari makassar sampai ke selayar Rp. 170.000/orang.

f. Jalur udara

1) Wings Air.Tipe pesawat ATR 72 dengan kapasitas 72 kursi. Berangkat dari Makassar jam 08.55 setiap hari selasa, kamis, dan sabtu. Tarif Rp. 400.000,- /orang. Waktu tempuh selama 20 menit.

2) Avia Star. Kapasitas penumpang 18 kursi. Berangkat setiap hari senin, rabu, dan jum'at. Waktu tempuh selama 40 menit 46 Adapun masalah transportasi menuju Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya untuk transportasi mengunjungi obyek-obyek wisata, pemerintah telah memiliki rencana untuk menghubungkan tiga provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Agar memudahkan pengunjung melakukan kunjungan wisata ke Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam rangka mewujudkan rencana tersebut pemerintah bekerjasama dengan kapal Pelni dan pengusaha-pengusaha travel.

2. Gambaran Umum Desa Pulau Madu

Desa Pulo Madu secara administratif termasuk dalam Kecamatan Pasilambena dan berada di Pulau Madu sendiri. Desa ini memiliki luas sekitar 7 Km2 dengan panjang pantai sekitar 20.750 meter. Pulo Madu adalah desa yang

berada di kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa ini merupakan satu dari 6 desa yang berada di kecamatan Pasilambena. Desa ini memiliki kodepos 92863.Desa ini memiliki jumlah penduduknya sebagian besar bersuku daerah Buton. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian nelayan serta petani.

Potensi dari segi jenis ikan ekonomis penting berupa Ikan Tuna Ekor Kuning (Madidihang), Ikan Katamba, Ikan Layang, Kerapu, dan Teripang. Selain hal tersebut potensi Keramba Jaring Apung berpotensial untuk dikembangkan di perairan daerah ini. Karakteristik fisik lahan pesisir di desa/pulau ini berupa pantai small cliff, koral, batu, mangrove dan memiliki kawasan terumbu karang.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Pulo Madu

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan	
1	Dusun Liganda	117	106	60 KK
2	Dusun Harapan Jaya	83	98	55 KK
3	Dusun Teehe'u	123	206	64
4	Dusun onesatonda Timur	231	206	111KK
5	Dusun Onesatonda Barat	111	101	53 KK
6	Dusun Mekar Indah	198	186	95 kk
	Total	1726		

Sumber : Kantor Desa Pulo Madu

Aksesbility penduduk ke ibukota kabupaten tergolong lancar dengan adanya kapal reguler dengan rute Desa/Pulau Madu – Benteng. Sedangkan akses

antar pulau menggunakan jasa kapal tradisional jolloro yang terdapat di di dermaga dan siap berangkat sesuai dengan kebutuhan. Desa Pulo Madu memiliki jumlah penduduk ini sekitar 1.865 orang. Jumlah kepala keluarga (KK) sekitar 496 KK . Mayoritas penduduk bersuku buton. Keseluruhan masyarakat di Desa Pulo Madu beragama Islam.

Struktur populasi dan mata pencaharian di Desa Pulo Madu di dominasi oleh petani (40 %), nelayan (30 %), pedagang (20%), PNS/ABRI (5%) dan jasa lainnya (5%). Umumnya aktifitas nelayan menggunakan sarana tanpa kapal motor. Aktifitas masyarakat pada musim barat (Desember – Mei) dilakukan aktifitas bertani dan pada musim timur (Juni – November) melakukan aktifitas melaut. Alat yang digunakan umumnya alat sederhana berupa bubu, pancing dan jaring ikan. Penjulan hasil penangkapan umumnya salurkan ke daerah Makassar, Buton dan Maumere.

Sarana jalan di Desa Pulo Madu yang terbuat dari pavin blok dan tanah pengerasan. Sarana jalan ini merupakan swadaya dari masyarakat dan bantuan dari pemerintah. Penerangan desa di suplai oleh mesin diesel yanmar 300 H-DI dengan lama menyala sekitar 6 jam, dari 18.00 – 24.00. Sarana penerangan di desa ini dilakukan oleh pihak swasta (skala kecil) dengan membebankanbiaya produksi sebesar Rp. 10.000 per mata lampu per bulan. Sarana sanitasi di Desa Pulo Madu tergolong baik dengan terdapatnya WC di hampir tiap rumah penduduk. Namun tempat pembuangan sampah belum dimiliki.

Intensitas dan Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang, Eksploitasi sumberdaya terumbu karang di Desa Pulo Madu masih dalam tingkat intensitas

sedang. Penggunaan destruktive fishing gear (bom dan cyanida) dan jangkar kapal di kawasan terumbu karang masih menjadi penyebab rusaknya struktur terumbu karang. Aktifitas tersebut selain dilakukan oleh beberapa warga setempat juga dilakukan oleh nelayan pendatang. Pemanfaatan sumberdaya ekosistem terumbu karang di wilayah ini masih tergolong tinggi dimana daerah baik pesisir maupun lautan merupakan daerah fishing ground baik oleh penduduk desa. Potensi wisata juga telah dikelola dengan baik dengan masuknya kawasan ini dalam Kawasan Nasional Takabonerate. Desa ini memiliki potensi wisata karena memiliki keindahan alam dan budaya. Potensi wisata pantai, diving dan budaya sangat dipotensial dikembangkan karena didukung oleh kemauan masyarakat dan sifat terbuka menerima orang luar oleh masyarakat.

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Pamsimas Di Desa Pulau Madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian dari pembangunan sosial yang memberi perhatian pada keseimbangan kehidupan manusia dalam memperbaiki kondisi sosialnya. Dalam upaya meningkatkan keberlanjutan lingkungan hidup, pemerintah Indonesia mempunyai komitmen sangat kuat dalam mencapai *Millenium Development Goals* (MDGs) yang salah satunya adalah menurunkan separuh proporsi penduduk yang tidak mempunyai akses terhadap air bersih dan sanitasi dasar pada tahun 2015 dalam Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat.

Program Pamsimas merupakan salah satu program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bersih pedesaan dengan pendekatan berbasis

masyarakat. Pelaksanaan Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan untuk dapat mengakses pelayanan air bersih serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui upaya pemberdayaan masyarakat.

Desa mempunyai kewenagan untuk mengurus dan mengatur segala urusan pemerintahan secara mandiri atas adanya otonomi desa. Otonomi desa merupakan landasan pembangunan desa. Otonomi desa mengarah pada pembangunan desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan pembangunan desa mentaras disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan yang dimaksud seperti rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), karang taruna, PKK dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Impeelentasi program Pamsimas (penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat). Program Pamsimas sendiri langsung dikelola oleh BUMDes desa Mentaras melalui BP-SPAMS (badan penyediaan air minum dan sanitasi).

a. Komunikasi Program PAMSIMAS

Air merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.Sektor Air Minum dan Sanitasi merupakan pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Tidak memadainya prasarana dan sarana Air Minum dan Sanitasi berpengaruh buruk pada kondisi lingkungan yang memiliki dampak lanjutan terhadap tingkat perekonomian keluarga. Ada hubungan antara lingkungan

yang sehat dengan derajat kesehatan masyarakat. Penyakit diare dan penyakit lain yang ditularkan melalui Air dan lingkungan masih merupakan masalah kesehatan terutama di tempat-tempat yang berpenghasilan rendah.

Program Penyediaan air minum dan senitasi Berbasi smasyrakat adalah suatu program yang di buat pemeintah untuk menanggulangi dan menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat mengenai kekurangan air serta keterbatasan dalam penerima cakupan air minum serta akses air bersih di lingkungan masyarakat.

Pelayanan sanitasi dan air bersih penting dalam usaha Peningkatan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi. Melahirkan SDM yang berkualitas. Tidak adanya sanitasi yang sesuai dan air bersih dalam jumlah yang cukup adalah awal dari munculnya masalah kesehatan pada masyarakat, misalnya menghambat pertumbuhan (stunting), kematian bayi dan ibu, penularan berbagai infeksi, dan penyakit lainnya.

Dalam Implementasi program merupakan tahapan terpenting dalam suatu proses kebijakan. Masalah-masalah yang tidak terprediksi dalam konsep perumusan kebijakan seringkali timbul dalam implementasi kebijakan dilapangan. Permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi implementor dalam melaksanakan kebijakan.

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya. Harapan dan pengalaman kepada orang lain. Dalam Penelitian ini indicator yang di maksudkan yaitu komunikasi antara pmerintah desa,pelaksana PAMSIMAS dan masyarakat. Komunikasi merupakan salah satu variabel terpenting untuk mempengaruhi

implementasi kebijakan, komunikasi sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dari sebuah implementasi kebijakan.

Impelentasi PAMSISMAS Di Desa Pulau Madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar Berikut hasil wawancara bersama Muhidin Sebagai Sekretaris desa Pulau Madu Kecamatan Pasilambena

> "PAMSIMAS ini salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kesejahtraan masyrarakat yang berfokus pada penyediaan air bersih untuk masyarakat untuk di desa pulau madu sendiri belum secara keseluruhan artinya dalam penerapakan hidup sehat pun belum merata secara keseluruhan karena kan salah satu factor nya itu tersedianya air bersih sebagai kebutuhan utama masyarakat menganai komunikasi antara masyarakat desa dan juga pegawai PAMSIMAS beserta masyarakat untuk saat ini berjalan dengan baik yah,namun memang perlu untuk dievaluasi lagi bagaimana terutama untuk dusun dusun yang masih belum dapat dialiri PAMSIMAS"

Selanjunya disampaikan oleh Isnawi Pegawai pamsimas

> "Sebagai petugas tentnya kami telah melakukan upaya dalam menjaga fasilitas yang ada dan menjalankan PAMSIMAS ini baik dengan mengontrol fasilitas yang ada apa ada kerusakan atau tidak serta pembersihan alat sehingga air yang ada pun tetap terjaga kualitasnya selain itu adanya komunikasi dengan masyarakat terkait keluhan yang di rasakan oleh masyarkat terutama bagi pengguna PAMSIMAS "

Berdasarkan hasil wawacara diatas dapat dilihat bahwa dalam Peningkatan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi belum berjalan secara keseluruhan masih terdapat dusun yang belum mendapatkan aliran air bersih sehingga membuat sebagian masyarakat tetap mengambil air secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Selanjuntya di sampaikan Jaenudin masyrakat desa

> "Pada awal air dari PAMSIMAS ini berjalan saya sangat senang, karena tidak kesulitan lagi untuk mendapatkan air bersih, dulunya saya harus berjalan kaki kurang lebih 1 km ke sumur air tawar yang biasa kami gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari."

Namun hal yang berbeda disampaikan oleh Sadam masyrakat desa

> "Program aliran air ini di dusun kami belum berjalan hanya ada dua dusun yang di aliri air dari PAMSIMAS sehingga kami kalo mau ambil air masih harus ambil sendiri ke sumur air tawar atau mandi dan mencuci pakaian langsung disana nanti membawa air lagi untuk kebutuhan di rumah "

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa dalam indicator Komunikasi antara masyarkat dan pemerintah juga petugas PAMSIMAS masih perlu untuk ditingkatkan agar air yang di dapat kan masyarakat desa dapat dirasakan secara menyeluruh.

Pamsimas memiliki dua tujuan yakni meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin desa serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dengan membangun sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan mampu diadaptasikan oleh masyarakat.Dalam pelaksanaanya meskipun berfungsi dengan baik, namun belum mampu memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat desa terutama yang tidak mempunyai akses air bersih.

b. Sumber daya PAMSIMAS

Pencapaian target penyediaan akses bagi seluruh masyarakat membutuhkan usaha dan kerja keras dari pemerintah dalam melakukan pembangunan layanan air. Masalah air bersih dan sanitasi merupakan masalah yang melibatkan beberapa faktor antara lain: masyarakat sebagai pelaku penghasil sampah, teknologi dan manajemen pengelolaan air bersih

dan sanitasi yang masing-masing mempengaruhi. Keberhasilan implementasi program PAMSIMAS sifatnya adalah berkelanjutan, fasilitas air bersih yang dibangun terus memberikan manfaat kepada masyarakat. Apabila setelah selesai pembangunan program PAMSIMAS namun fasilitas air bersih tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maka pelaksanaan dari program PAMSIMAS boleh dikatakan gagal dalam memberikan pelayanan air bersih yang layak.

Indikator sumber daya adalah keberhasilan proses implementasi yang di pengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia.Indicator sumber daya terdiri dari beberapa elemen diantaranya staf sebagai sumber daya utama dalam implementasi kebijakan atau sumber daya manusia.kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi salah satunya disebab kan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten pada bidannya.selanjutnya informasi dalam implementasi kebijakan dan yang terahkir wewenang ,pada umumnya wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan ,kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksan dalam melaksanakan kebijakan.

Indikator Sumber daya pada penelitian ini yaitu bagaiman sumber daya manusia yaitu pemerintah setempat pegawai PAMSIMAS beserta masyarakat dalam pelaksaan program PAMSIMAS.

Berikut hasil wawancara bersama Muhidin sebagai Sekretaris Desa Pulau Madu Kecamatan Pasilambena

> “Ada enam dusun di desa Pulo madu tapi sejauh ini sejak didirikannya PAMSIMAS hingga sekarang baru dua dusun yang

> dialiri air dari PAMSIMAS ini di karenakan sumber air yang di kelola itu dari dusun liaganda yang bersebelahan dengan dusun harapan jaya, sedangkan dusun onesatonda timur ,onesatonda bara dan dusun teehu'u masih sangat kesulitan dalam mendapatkan air minum atau air bersih, ini di karenakan ketiga dusun itu jauh dari dusun liaganda yang berjarak 5 km, dan pipa penyaluran air yang di pake dari dusun liaganda menuju ketiga dusun itu telah rusak hal ini di sebabkan pemasangan pipa yang kurang baik dan tidak di pelihara sebagaimana mestinya.

Selanjutnya disampaikan oleh Isnawir pegawa Pamsimas

> "berbicara soal sarana dan prsarana yang ada sejak di bangun masih sangat di butuhkan adanya perbaikan baik itu dalam pemenuhan sarana dan prasaran agar aliran air bisa dirasakan oleh semua dusun yang ada di desa dan juga adanya pipa yang rusak dan tentunya ini berpengaru pada pelayanan yang di berikan kepada masyarakat, mengenai pegawai juga masih sangat kurang mungkin ini juga menjadi salah satu menyebab program ini masih belum secara menyeluruh "

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa dalam Indikator sumberdaya masih sangat perlu untuk ditingkatkan lagi dapat dilihat dari segi peyanan pun masih sangat kurang padahal pengguna PAMSIMAS tidak menyeluruh serta masih perlu adanya perbaikan serta penambahan dalam hal pemenuhan aliran air untuk dusun-dusun yang belum di aliri PAMSIMAS.selanjutnya disampaikan Jaenudin masyarakat desa

> "Kalo dari tempat saya tinggal saya merasa bahwa sudah terpenuhi dalam pemenihan air sehingga tidak perlu lagi jalan kaki untuk mengambil air"

Namun hal berbeda yang di sampaikan Sadam masyarakat desa

> "Alian air pamsimas yang tidak merata diseluruh desa kami tidak merasakan sepenuhnya mengenai ketersediaan air yang sudah di bangun karena jarak yang cukup jauh dari dusun sat uke dusun yang satu "

Berdasarkan hasil wawancaa diatas dapat dilihat bahwa Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi tidak berjalan secara merata,serta Kondisi sarana sanitasi masyarakat Desa masih sangat minim di beberapa dusun untuk itu diperlukan peningkatan. Sanitasi berupa segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan dan memutuskan mata rantai kuman dari sumber penularannya serta pengendalian lingkungan.

Tabel 4.4 Jumlah Pengguna PAMSIMAS

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Pengguna PAMSIMAS
1	Dusun Liganda	60 KK	✓
2	Dusun Harapan Jaya	55 KK	✓
3	Dusun onesatonda Timur	64KK	
4	Dusun Onesatonda Barat	111KK	
5	Dusun Teehe'u	53 KK	
6	Dusun Mekar Indah	95 kk	

Sumber : Dikelola Peneliti

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pengguna PAMSIMAS di desa Pulau Madu tidak merata keseluruh lapisan masyarakat dari 6 dusun hanya 2 dusun yang di aliri PAMSIMAS dengan jumalah keseluruahan Pengguna 105 KK.

Gambar 4.2. Mesin Pompa Air Bersih

c. Disposisi PAMSIMAS

Kebijakan pembangunan pada hakikatnya haruslah bersifat adil, demokrasi, terbuka, partisipatif, dan terintegrasi, sehingga kesenjangan pembangunan daerah yang ada saat ini dapat teratasi. Untuk mengatasi suatu ketertinggalan di daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah itu sendiri. Dalam sebuah pembangunan diperlukan suatu pembangunan yang menyeluruh, mulai dari pembangunan sektor kecil pembangunan tingkat desa dengan berbagai faktor permasalahan di desa yang dilanjut ke tingkat permasalahan yang lebih tinggi ke tingkat Kabupaten/Kota dan Nasional.

Indikator disposisi atau sikap adalah faktor ketiga yang mmempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Dalam penelitiani in disposisi yaitu sikap dari pemerintah setempat dalam menjalan kan PAMSIMAS di desa Pulau Madu.

Dalam implementasi program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) memiliki pemahaman yang berbeda tentang tujuan dan maksud implementasi suatu kebijakan dibanding dengan para aktor pada level yang lebih tinggi. Street-level bureaucrats memegang posisi penting dalam proses implementasi kebijakan. Karena mereka yang langsung berhubungan dengan kelompok sasaran maka interpretasi mereka tentang tujuan kebijakan dan bagaimana tujuan tersebut diwujudkan di lapangan akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Program PAMSIMAS di desa Pulau Madu Kecamatan Pasilambena di Kelola Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

(KPSPAMS) Sedangkan untuk Kepala Desa sendiri dalam program ini bertindak sebagai penanggung jawab kelangsungan pengelolaan air minum dan sanitasi yang dikelola oleh Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) yang nantinya menyampaikan hasil laporan kinerjanya secara rutin kepada Kepala Desa. Berikut hasil wawancara bersama Muhidin sebagai Sekretaris desa Pulau madu

> "PAMSIMAS adalah program pemerintah dalam pemenuhanan air bersih yang dikelola melalui Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) setiap bulan ada rapat rutin yang dilakukan untuk mengetahui kendala yang dirasakan masyrakat itu apa saja serta memusyawarakan soluli atas keluhan yang di sampaikan. Serta ada membuatan laporan keuangan disetiap bulannya".

Selanjunya disampaikan Isnawirsebagai Pegawai PAMSIMAS

> "Dalam pengelolaan manajemen kami membuat laporan bulanan serta melaukan rapat rutin baik itu bersama pemerintah desa dan juga masyarakat serta internal pegwai PAMSIMAS"

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pada indicator disposisi pelaksanaan PAMSIMAS dilakukan dengan melakukan evaluasi disetiap bulannya baik itu dengan melalui laporan yang dibuat disetiap bulan dan juga dilakukan melalui rapat rutin.

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah), untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan dan menciptakan perilaku hidup bersih melalui promosi kesehatan lingkungan dan penyediaan prasarana / sarana air minum serta sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Gambar 4.3. Rapat Rutin Pengurus PAMSIMAS dan Masyarakat

Sumber : Rapat Rutin Pengelola PAMSIMAS dan Masyarakat

d. Struktur Birokrasi PAMSIMAS

Struktur birokrasi yaitu Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi *adalah Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Sektor air minum dan sanitasi merupakan pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Tidak memadainya prasarana dan sarana air minum dan sanitasi, khususnya di pedesaan berpengaruh buruk pada kondisi Kesehatan dan lingkungan yang memiliki dampak lanjutan terhadap tingkat perekonomian keluarga. Penyediaan prasarana dan sarana air minum

dan sanitasi yang baik akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta waktu yang dapat dihemat dari usaha untuk mendapatkan air minum dan sanitasi yang baik. Ketiga dampak tersebut akan memberikan dampak lanjutan berupa peningkatan produktivitas masyarakat.

PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan sanitasi Berbasis Masyarakat) merupakan salah satu program Pemerintah yang bertujuan menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta melibatkan masyarakat secara aktif melalui sosialisasi program, pembangunan sarana air bersih, pembentukan badan pengelola, pemeliharaan dan pengelolaan sarana, dan kesinambungan program.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat desa menjadi salah satu tanggung jawab desa dalam hal ini menjadi wadah bagi masyarakat hukum untuk mengatur dan mengurus kehidupannya baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan lainnya. Seperti yang kita ketahui, desa merupakan salah satu tolak ukur kualitas dalam suatu negara dan juga salah satu tolak ukur dalam segala proses pembangunan bangsa dan Negara. Pembangunan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sesuai di dalam Pasal 67 Ayat 2B Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu “meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa”.

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. SOP menjadi aspek pertama pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan, dan aspek dua adalah struktur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Berikut hasil wawancara bersama Muhidin Sekretaris desa Desa Pulau Madu

> "Melihat dari sebelum program ini ada dan tidak tentu ada perbedaan yang di rasakan masyrakat terutama bagi dusun-dusun yang di aliri PAMASIMAS hanya saja dalam pengelolaannya perlu ada evaluasi lebih lanjut terlebih hingga saat ini sejak program ini dilaksanakan hanya ada dua dusun yang dialiri sementera ini tidak sampai setengah dari bagian desa pulau madu sehingga ini juga menyebabakan program ini kurang maksimal dalam pengelolaan PAMSIMAS petugasnya ada juga pemerintah desa yang turut menjadi bagian dari PAMSIMAS "

Selanjutnya disampaikan Isnawir sebagai pegawai PAMSIMAS

> " Kami sebagai pewagai yang tentunya berhubungan langsung dengan pengelolaan PAMSIMAS dan juga Masyarakat melihat bahwa program ini belum maksimal secara keseluruhan terlebih adanya kerusakan dari beberapa pipa ini juga menjadi salah satu tanggung jawab kami agar penyaluran air bersih kepada masyrakat tidak menjadi kendala yang berdampak besar terhadap Masyarakat"

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah desa melalui kepala desa serta juga pegawai pamsimas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan PAMSIMAS di Desa Pulau madu namun masih perlu adanya evaluasi dalam pelaksanaannya agar fungsi serta tanggung jawab pemerintah desa terhadap program PAMSIMAS dapat bejalan lebih baik lagi.

Sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang dihasilkan harus dapat

memberikan layanan kebutuhan air minum dan sanitasi secara kontinyu dengan kualitas yang dapat diterima (dari sudut pandang pengguna/masyarakat maupun pemerintah), mencukupi kebutuhan dan keterlibatan masyarakat dalam pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi agar tetap berfungsi. Semakin besar kontribusi masyarakat maka semakin tinggi komitmen masyarakat warga untuk memiliki dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS.

2. Faktor-Faktor pendukung dan penghambat implementasi Pamsimnas di Di Desa Pulau Madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar

Program Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) adalah untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat perdesaan khususnya masyarakat di desa yang jauh dari ibukota kabupaten dan sulit air. Selain meningkatkan praktek hidup bersih dan sehat di masyarakat serta bertambahnya jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan. Sasaran program Pamsimas, bagaimana meningkatnya jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sarana air minum, sarana sanitasi dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan Pamsimas, diharapkan mereka dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan.

Pemenuhan kebutuhan air bersih, Pemerintah Desa Pulau Madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Program Air

Minum dan Sanitasi yang berbasis masyarakat untuk membangun prasarana penyedian air bersih dan sanitasi bagi masyarakat perdesaan yang akses air bersih rendah terutama di daerah-daerah rawan air bersih yang belum terjangkau pelayanan PDAM. Dlam pelakanaannya tentu saja ada factor penghambat dan factor pendukung dalam mengimplementasikan Pamsimnas di Di Desa Pulau Madu. Berikut hasil wawancara bersama Muhidin Sekretaris Desa Pulau Madu

> "Sejak Program ini berjalan yang dialiri itu hanya dua dusun hal ini karena akses ke dusun satu dengan dusun lainnya yang jaraknya cukup jauh sehingga agak sulit untuk di jangkau dan ini perlu diperhatikan lagi agar nantinya bisa di cari solusi terkait dengan penyaluran airnya agar merata kalo factor pendukungnya tenntunya parisipasi masyrakat dalam mendukung agar program ini dapat berjalan dengan rutin membayar iruan bulanan "

Selanjunya disampaikan Isnawir sebagai pegawai PAMSIMAS

> "Masalah utama nya untuk sekarang masih ada 3 dusun lagi yang belum di aliri dan ini perlu untuk di perhatikan Kembali kemudian adanya kerusakan pipa ini juga merupakan salah satu fakor yang mempengaruhi "

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa pandangan tentang pelaksanaan program pembangunan memerlukan adanya faktor yang mendukung dan factor penghambat terselenggaranya suatu program kegiatan yang bermutu, tepat waktu, dan tepat sasaran dengan mengaktifkan sacara efektif.

C. Pembahasan

Salah satu bentuk pelayanan dasar yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah daerah Kabupaten/Kota adalah penyediaan kebutuhan air minum dan sanitasi yang sangat berkaitan erat dengan kondisi kesehatan

masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan suatu hal yang sangat penting dan menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan karena disamping kesadaran masyarakat akan hidup sehat masih diragukan, sarana untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat pun dirasa masih sangat terbatas.

Masalah pemenuhan kebutuhan air bersih ini memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah maupun masyarakat, mengingat air bersih merupakan kebutuhan pokok bagi setiap warga masyarakat. Salah satu program pemerintah dalam penyediaan air bersih serta sanitasi adalah PAMSIMAS yaitu program yang dilaksanakan pemerintah untuk membantu menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam penyediaan air bersih serta mengatasi masalah sanitasi yang berbasis masyarakat terutama masyarakat perdesaan dan pinggiran kota. Dengan program tersebut masyarakat dapat mengakses air bersih serta diajarkan cara-cara perilaku hidup bersih dan sehat untuk dirinya sendiri, keluarga dan di lingkungan.

Melihat berbagai tantangan yang dihadapi untuk memberikan pelayanan air minum dan sanitasi yang memadai maka tercetuslah program *third water supply and sanitation for low income community* (WSLIC) yang kemudian dikenal sebagai PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) dalam rangka menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat melalui penyediaan pelayanan air bersih dan sanitasi. Pelaksanaan program PAMSIMAS dilandasi dengan kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJPN mengamanatkan pada akhir

periode RPJM 2015-2019 layanan dasar air minum dan sanitasi dapat dinikmati oleh seluruh rakyat indonesia. Ada 5 (lima) komponen program dalam program PAMSIMAS yaitu, Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah, Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi, Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum, Insentif Desa/Kelurahan Dan Kabupaten/Kota; dan Dukungan manajemen pelaksanaan program. Program ini dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran Kota. Program PAMSIMAS bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat yang kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan pinggiran agar dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target sektor air minum dan sanitasi melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. Program Pamsimas adalah salah satu bentuk aksi nyata dari pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah dalam upaya pembangunan desa dan peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, dan meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan di desa, serta berupaya menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan yang tidak bersih.

Pada penelitian ini menggunakan Indikator Implementasi dengan empat indicator yaitu komunikasi,sumber daya,disposisi dan struktur birokrasi.

Komunikasi (communications): berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat,

dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus di lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide di antara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pada Penelitian ini indicator Komunikasi dalam program PAMSIMAS menunjukan bahwa Program PAMSIMAS di Desa Pulau madu masih perlu di tingkatkan Kembali dikarenakan penyaluran air yang masih tidak merata di rasakan masyrakat.

Selanjutnya Indikator Sumber daya dalam implementasi kebijakan menduduki posisi yang penting. Ketiadaan sumber daya atau kurang optimalnya potensi sumber daya akan berakibat ketidakefektifan penerapan kebijakan. Sumber sumber yang penting meliputi sumber daya manusia yang memadai serta keahlian-keahlian yang yang baik untuk melaksanakan tugastugas mereka, wewenang serta fasilitasfasilitas yang diperlukan.

Pada Penelitian ini Indikator Sumber daya menunjukan bahwa tidak berjalan secara merata,serta Kondisi sarana sanitasi masyarakat Desa masih sangat minim di beberapa dusun untuk itu diperlukan peningkatan.

Pada Indikator Disposisi, Kecenderungan sikap dapat dilihat dari tanggung jawab/komitmen aparat dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa petugas memiliki komitmen yang baik dalam melaksanakan kewajibannya meskipun masih diperlukan perhatian yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi institusi sebagai tindak lanjut komitmen. Untuk

memperoleh dukungan yang maksimal dari kecenderungan sikap pelaksana, pemberian insentif dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat positif berupa pemenuhan kepentingan pribadi (self interest) hingga pengenaan sanksisanksi yang dipandang dapat memperbaiki dan menimbulkan dukungan sikap positif para pelaksana kebijakan.

Pada Indikator Disposisi Pelaksanaan Program menjukan bahwa manajemen pelaksanaan PAMSIMAS dilakukan dengan melalukan evaluasi disetiap bulannya baik itu dengan melalui laporan yang dibuat disetiap bulan dan juga dilakukan melalui rapat rutin.

Pada Indikator Strukur Birokrasi Pelakanaan Program PAMSIMAS menunjukan bahwa Struktur birokrasi yang baik akan membuat pelaksana kebijakan memberikan ruang bagi para pelaksana melakukan berbagai koordinasi kepada semua unit terkait sehingga dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah.

Adapun factor penghambat implementasi Pamsimnas di Di Desa Pulau Madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai sedangkan Faktor pendukung implementasi Pamsimnas di Di Desa Pulau Madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu partisipasi masyrakat baik dalam menjaga fasilitas yang ada dan juga partisipasi dalam rapat rutin serta pembayran iuran yang dilaukan secara rutin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan peneliti tentang Implementasi Pamsimas Di Desa Pulau Madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Pamsimas Di Desa Pulau Madu Kecamatan Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Penelitian ini indicator Komunikasi dalam program PAMSIMAS menunjukan bahwa Program PAMSIMAS di Desa Pulau madu masih perlu di tingkatkan Kembali dikarenakan penyaluran air yang masih tidak merata di rasakan masyrakat. Pada Penelitian ini Indikator Sumber daya menunjukan bahwa tidak berjalan secara merata,serta Kondisi sarana sanitasi masyarakat Desa masih sangat minim di beberapa dusun untuk itu diperlukan peningkatan . Pada Indikator Disposisi Pelaksanaan Program menjukan bahwa manajemen pelaksanaan PAMSIMAS dilakukan dengan melalukan evaluasi disetiap bulannya baik itu dengan melalui laporan yang dibuat disetiap bulan dan juga dilakukan melalui rapat rutin. Pada Indikator Strukur Birokrasi Pelakanaan Program PAMSIMAS menunjukan bahwa Struktur birokrasi yang baik akan membuat pemerintah beserta petugas PAMSIMAS memberikan ruang bagi Masyarakat dalam berkoordinasi dalam pelaksanaan program PAMSIMAS.
2. Faktor Penghambat sarana danprasarana dan factor pendukung partisipasi masyarakat

B. Saran

1. Demi kelancaran dan keberhasilan suatu program, maka maka pemerintah desa dan pengelola Pamsimas perlu melakukan peningkatan dalam pemenuhan sarana dan prasarana agar penyaluran dapat di rasakan seluruh masyrakat.
2. Masyarakat ikut serta menjaga fasilitas dari Pamsimas yang sudah ada seperti meteran dan pipa. Pemerintah daerah harus lebih responsive dalam menunjang kegiatan dan program dari pamsimas agar program ini lebih cepat dan lebih meratah dirasakan masyarakat. Lebih khusus dari Pemerintah Desa agar lebih sigap dan tanggap dalam menjalankan Program Pamsimas

DAFTAR PUSTAKA

Amala, Z. A. Dan R.(2016). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan. Xx(02),262-277.

Andriani, Husni Thamrin, D. H. P. (N.D.). Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Tahap Ii Di Kabupaten Lahat (Studi Kasus Peningkatan.

Bagus Danar Andito, Ari Subowo, D. R. J. (2013). Evaluasi Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.

Berbasis, S., & Pamsimas, M. (n.d.). *Efektivitas program penyediaan air minum dan*. 1–12.

Chenda Destarian1, B. P. (2015). Jurnal Teknik Pwk Volume 4 Nomor 4 2015.4(4), 530-541.

Chyntia Apulina Karina Surbakti, Edy Akhyary, E. (2022*). Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong Chyntia.328-336.*

Dan, M., Berbasis, S., Pamsimas, M., Kasus, S., Desa, D. I., & Kecamatan, C. (2021). *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Penyediaan Air Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*. *12*, 83–96.

Dan, M., Berbasis, S., Pamsimas, M., Kasus, S., Desa, D. I., & Kecamatan, C. (2021). *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Penyediaan Air Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*. *12*, 83–96.

Sahya Anggara, M. S. (N.D.). Kebijakan Publik. 2014.

Faisyal Rani,Sip, M. (2012). *Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan Faisyal Rani,Sip,Ma *. Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektifsosial Pembangunan*, 4(1).

Filsa Nurtifani Sulaiman, Khotibul Umam, N. H. (2022). *Analisis Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Terhadap Debit Dan Kehilangan Air (Studi Kasus Kabupaten Jepara)*.11(4),8-15.

Firdaus, R. (2020). Jurnal I La Galigo / Public Administration Journal Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Jurnal I La Galigo / Public Administration Journal. 3(2), 1-8.

Hakim,L., & Malik, I. (2012). Di Kabupaten Bantaeng.Ii(2),191-200.

Harahap, N. (2020). Penelitian Kualitatif. Wal Ashari Publishing.

Helva Rahmi, & Elsyra, N. (2022). Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Dusun Sungai Mancur. 4(4).

Ia, V. Ta E. (2015). Air Dan Sanitasi: Dimana Posisi Indonesia 157-179.

Iman, N. I., Mahsyar, A., Parawu, H. E., Negara, I. A., Makassar, U. M., Negara, I. A., Makassar, U. M., Negara, I. A., & Makassar, U. M. (2023). Implementasi Kebijakan Premi Kebijakan Asuransi Nelayan du Kelurahan Sapolohe Kecamatan Kabupaten Bulukumba. *4*(April).

Kornita, S. E. (2020). Strategi Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat terhadap Air Bersih di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, *11*(2), 166–181. https://doi.org/10.33059/jseb.v11i2.1883

K.Yasminel,M.R. (2020). Kajian Manfaat Implementasi Program Pamsimas Di Desa Pekuncen, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal. 9(3),187-197. Kristanto,A.,& Selly., R. N. (2021). Implementasi Program Penyediaan Air Minum

Litbang, B., Ekonomi, S., & Bidang, L. (2014). Penilaian Sistem Pelayanan Infrastruktur Air Minum Program Pamsimas Service System Assessment Of Drinking Water Infrastructure On Pamsimas Program (Case Study Kabupaten Cilacap).79-87.

Mega,P.,Kusuma,L.,& Musmini,L. S.(2020). Menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pamsimas Pada Bumdes Giri Artha. 11(1).

Mulyadi. (2015). Those Activities Directed Toward Putting A Program Into Effect ". 11-35.

Munarika, N. (2018). Bentuk-Bentuk Strategi.15-56.

Novianigsih,E. P. B.,& Mursyidah, L. (2019). *Communication In The Implementation Of The Community-Based Drinking Water And Sanitation Provision Program (Pamsimas) In Tanjekwagir Village , Krembung District, Sidoarjo Regency Komunikasi Dalam Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi* B. 7(16),1-6.Https://Doi.Org/10.21070/Jkmp.V7i1.1695

Pangemanan,M.B. S., & Pangemanan,F. (2020). Issn:2337 -5736. Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Manado),4(4),1-10.

Penamas, J., Buana, A., Filtrasi, M.,Bersih,A.,& Junwangi, D.(2021). Pendampingan Pamsimas Dalam Penerapan Teknologi Tepat Guna Mikro Filtrasi Desa Junwangi Sidoarjo. 4(02),118-123.

Pengembangan, M., Administrasi, P., & Masyarakat,B.(2018). Jurnal Ilmu Administrasi(Jia).Xv(2),148-162.

Praktisi, V. R. (2015). Implementasi Kebijakan Program Pamsimas (Penyedian Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). 1,171-200.

Rukayat, Y. (2017). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Pasirjambu. 2,56-65.

Rahmawati, A., Ansari, M. I., & Parawangi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone. *Universitas Muhammadiyah Makassar*, *1*(1), 218–231.

Ryan, Cooper, & Tauer. (2013). No Title. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.

Suprapto, S., & Malik, A. A. (2019). Implementasi Kebijakan Diskresi Pada Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (Bpjs). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, *7*(1), 1–8. https://doi.org/10.35816/jiskh.v7i1.62

Wahyudi, E. (2020). Kata kunci : Implementasi kebijakan, Motivasi dan Kinerja Pegawai. *Indept*, *8*(3), 2087–9245.

L A M P I R A N

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung MPP Jln. Ahmad Yani Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 21083, email: pmptspselayar@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 0658/Penelitian/VI/2023/DIS PMPTSP

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama Peneliti	:	**ROBYNSON**
Alamat Peneliti	:	**Dusun Mekar Indah**
Nama Penanggung Jawab	:	**ROBYNSON**
Anggota Peneliti	:	-

Untuk melakukan penelitian dalam rangka "Untuk Mengetahui Implementasi Pamsimas Di Desa Pulo Madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar" di :

Lokasi Penelitian	:	Desa Pulau Madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Kelayar
Judul Penelitian	:	Implementasi Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Desa Pulau Madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Kelayar
Lama Penelitian	:	2 Bulan
Bidang Penelitian	:	Sosial Politik
Status Penelitian	:	Perorangan

Surat Keterangan Penelitian ini berlaku sampai dengan tanggal 25 Juli 2023

Dikeluarkan : Benteng
Pada Tanggal : 12 Juni 2023

a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA DINAS

Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar

Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si
NIP. 19660507 198603 1 022

Rp. 0,-
Tembusan
1. Kepala Badan Kesbangpol di Benteng
2. Arsip

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Universitas Muhammadiyah Makassar
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences
Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email : fisip@unismuh.ac.id
Official Web : https://fisip.unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

Nomor : 1702/FSP/A.5-VI/X/1444/2022

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Robynson

Stambuk : 1056111116719

J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara

Dengan Rencana Judul Skripsi :

"Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Pulo Madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar"

Pembimbing I : Dr. Abdul Mahsyar, M.Si

Pembimbing II : Dr. Anwar Parawangi, M.Si

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistimatis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan Hasil penulisan yang telah dicapai.

Di tetapkan : di Makassar
Pada tanggal : 17 Oktober 2022

D e k a n,

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727

Tembusan Kepada yth :

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **17513/S.01/PTSP/2023**
Lampiran : -
Perihal : **Izin penelitian**

Kepada Yth.
Bupati Kep. Selayar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1576/05/C.4-VIII/V/1444/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: **ROBYNSON**
Nomor Pokok	: 105611116719
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" IMPLEMENTASI PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI DESA PULAU MADU KECAMATAN PASILAMBENA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. ***25 Mei s/d 25 Juli 2023***

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami ***menyetujui*** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 25 Mei 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Drs. MUH SALEH, M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

BAB I ROBYNSON - 105611116719

ORIGINALITY REPORT

6%	5%	0%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Brookdale Community College Student Paper	2%
2	journal.unnes.ac.id Internet Source	2%
3	repository.upi.edu Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches < 2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LULUS
turnitin
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II ROBYNSON - 105611116719

ORIGINALITY REPORT

13%	7%	1%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Maritim Raja Ali Haji Student Paper	3%
2	moraref.kemenag.go.id Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Riau Student Paper	1%
4	core.ac.uk Internet Source	1%
5	Submitted to UIN Jambi Student Paper	1%
6	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
7	123dok.com Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	1%
9	www.scribd.com Internet Source	1%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LULUS
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

turnitin

BAB III ROBYNSON - 105611116719

ORIGINALITY REPORT

10%	10%	3%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	3%
2	repository.unpkediri.ac.id Internet Source	3%
3	docplayer.info Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas PGRI Madiun Student Paper	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches < 2%

LULUS
turnitin

BAB IV ROBYNSON - 105611116719

ORIGINALITY REPORT

10%	8%	0%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id-free.info Internet Source	4%
2	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	2%
3	fdocuments.net Internet Source	2%
4	docplayer.info Internet Source	2%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	On		

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LULUS
turnitin
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB V ROBYNSON - 105611116719

ORIGINALITY REPORT

0%	0%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LULUS
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		

turnitin

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin N0.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Robynson
Nim : 105611116719
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	6 %	10 %
2	Bab 2	13 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 09 Agustus 2023
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursinah, S.Hum., M.Lis
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

1. Wawancara dengan Pegawai PAMSIMAS

2. Wawancara dengan Sadam Masyarakat Desa Pulo madu, Kecamatan Pasilambena, kabupaten Kepulauan Selayar

3. Wawancara dengan Sekretris Desa Pulo Madu, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar

4. Wawancara dengan Masyarakat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Robynson. Lahir di Desa Pulo madu kecamatan pasilambena kabupaten Kepulauan Selayar, provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 24 mei 1999.Anak dari pasangan Musliadi dan ST Aminah. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yakni Jeky Musliadi dan Suci Musliadi. Penulis Mengawali Pendidikan formal pada tahun 2007 di Sekolah Dasar Inpres liaganda dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan Sekolah Tingkat Pertama pada tahun yang sama di SMP NEGERI 3 Pasilambena dan lulus tiga tahun kemudian pada tahun 2016. Selanjutnya masuk pada Sekolah Menengah Akhir di SMK Negeri 1 Selayar dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis di terima menjadi mahasiswa ilmu administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada tanggal 15 Agustus 2023 penulis di lulus dengan lama studi 3 tahun 8 bulan dan berhak menyandang gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara melalui Ujian Komprehensif Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.